

# PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN KETEPATAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Sandi Irwan Zega<sup>1</sup>, Linda A. O. Tanor<sup>2</sup>, Miryam P. Lontoh<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado, Indonesia

e-mail: sandiirwan2018@gmail.com<sup>1</sup>, lindatanor28@gmail.com<sup>2</sup>, miryamlontoh@unima.ac.id<sup>3</sup>

**Abstrak:** Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk memastikan dampak penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pemerintah daerah. Untuk memastikan dampak kinerja pejabat pemerintah daerah pada akurasi tujuan anggaran. Untuk memastikan dampak penganggaran berbasis kinerja dan ketepatan sasaran anggaran terhadap kinerja pejabat pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini adalah Kinerja aparatur pemerintah daerah di BPKAD Minahasa dipengaruhi secara positif oleh penganggaran berbasis kinerja; akibatnya, sistem penganggaran yang berorientasi pada hasil yang semakin diterapkan dengan sangat tepat juga akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah di BPKAD Minahasa. Kinerja aparatur pemerintah daerah BPKAD Minahasa dipengaruhi secara positif oleh ketepatan tujuan anggaran, oleh karena itu dapat diartikan bahwa kinerja pemerintah daerah di BPKAD Minahasa akan meningkat berbanding lurus dengan seberapa akurat tujuan anggaran tercapai.  
**Kata Kunci:** Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

**Abstract:** *The objective in this study is to ascertain the impact of performance-based budgeting on the effectiveness of local governments. To ascertain the impact of the performance of local government officials on the accuracy of budget objectives. To ensure the impact of performance-based budgeting and the accuracy of budget targets on the performance of local government officials. The results of this study are The performance of local government apparatus in BPKAD Minahasa is positively influenced by performance-based budgeting; As a result, a results-oriented budgeting system that is increasingly implemented very precisely will also improve the performance of local government apparatus in BPKAD Minahasa. The performance of the local government apparatus of BPKAD Minahasa is positively influenced by the accuracy of budget objectives, therefore it can be interpreted that the performance of local governments in BPKAD Minahasa will increase directly proportional to how accurately the budget objectives are achieved.*

**Keywords:** *Performance-Based Budgeting, Accuracy of Budget Targets, Performance of Local Government Apparatuses*

## PENDAHULUAN

Anggaran adalah laporan keuangan yang memperkirakan kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu (Pratiwy 2013). Kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan dalam menyusun anggaran pemerintah, bukan hanya kepentingan individu penyumbang (Mardiasmo, 2009:61). Anggaran sektor publik merupakan mekanisme pencapaian tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Karena penganggaran adalah hasil dari perencanaan, kedua proses ini saling berhubungan. Anggaran untuk sektor publik harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi pergeseran prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Kinerja pemerintah saat ini menjadi sorotan publik, khususnya instansi pemerintah yang sebagian besar mendapatkan pendanaan dari wajib pajak. Kinerja atau disebut juga prestasi kerja adalah hasil dari kualitas dan kuantitas pekerjaan yang diselesaikan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya (Mangkunegara, 2007:9). Akibatnya, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain saat mengevaluasi kinerja daripada hanya melihat berapa banyak uang yang telah digunakan.



Agar penilaian kinerja bermanfaat bagi perkembangan suatu perusahaan, penilaian tersebut harus sejalan dengan visi dan tujuannya. Pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kinerja karena membantu karyawan tumbuh secara intelektual dan pribadi. Sumarsono (2009: 92) mengklaim bahwa sumber daya manusia dan pendidikan (SDM).

Pengertian tata pemerintahan yang baik adalah pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip berikut: keunggulan dalam pelayanan, profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan penghormatan terhadap aturan hukum. Pengesahan UU 32 dan 33 tahun 2004 membawa perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berujung pada reformasi pengelolaan keuangan daerah; Akibatnya, pemerintah pusat dan daerah terpaksa memikul tanggung jawab penuh atas pendistribusian uang yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Tuntutan demokrasi yang dibarengi dengan reformasi sektor publik telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Anggaran yang menunjukkan bagaimana tahap perencanaan dilakukan, digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan lembaga pemerintah. Agar tata kelola dan pembangunan dapat terjadi secara efektif dan berhasil, ada kebutuhan mendesak untuk implementasi dan tanggung jawab yang tepat, tidak ambigu, dan aktual. Memikirkan bagaimana menjalankan otonomi sehingga benar-benar mencapai tujuan, yaitu meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat, akan dimulai dengan perumusan kebutuhan masyarakat (Avionita, 2013). Pendekatan penganggaran yang dikenal dengan performance-based budgeting (juga dikenal sebagai performance item budgeting) difokuskan pada output organisasi dan dihubungkan dengan visi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi (Bastian, 2006:171). Melalui pelaksanaan reformasi pemerintah,

Berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, antara lain sistem perencanaan nasional, penganggaran dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja, penatausahaan keuangan daerah yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban belanja, ketepatan sasaran anggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. melalui audit internal, berdampak pada kualitas Satuan Kerja Perangkat Daerah BPKAD. Implementasinya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program kerja yang pro rakyat sebagai kekuatan yang dimiliki lembaga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien (Ary, 2015).

Penyerapan anggaran tahunan dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas perangkat pemerintah daerah. Pemerintah diantisipasi untuk dapat menggunakan anggaran secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga, mendorong lebih banyak keterbukaan, dan membuat manajemen sektor publik lebih akuntabel dengan diperkenalkannya penganggaran berbasis kinerja. Menurut Mardiasmo (2004), penggunaan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik merupakan perwujudan pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mencapai tujuan kinerja instansi pemerintah yang efisien dan efektif, pemerintah sebagai pengelola uang publik tidak hanya memperhatikan penyerapan anggaran tetapi juga ketepatan sasaran anggaran yang digunakan (Paramitha, 2016). Untuk mengetahui apakah kinerja yang terjadi di lapangan tepat sasaran bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, maka ketepatan sasaran anggaran dalam sistem pemerintahan daerah sangat diperlukan. Ketepatan sasaran anggaran pemerintah daerah akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur daerah, sehingga hasil akhir kinerja merupakan produk akhir organisasi yang sejalan dengan tujuan organisasi (Pratiwy, 2013).

Di Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, terdapat sejumlah persoalan terkait kinerja pemerintah daerah pada tahun anggaran 2019–2021. Salah satunya adalah masalah pergerakan dana. Sedangkan salah satu anggota DPRD Kabupaten Minahasa mengatakan pemerintah masih kurang dalam pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini terlihat dari tingginya dana transfer yang menyebabkan ketersediaan anggaran kas daerah berkurang. Rutinitas belanja rutin juga terganggu akibat hal ini. Jumlah uang daerah yang diterima secara

keseluruhan kurang dari pengeluaran Pemkab Minahasa yang cukup besar. Masalah sumber daya manusia adalah alasan kedua. Karyawan yang ditempatkan pada divisi pengelolaan keuangan tidak dapat mengelola sumber daya manusianya dengan baik. sehingga tidak dapat mengkategorikan sumber pendapatan daerah. Pemerintah harus merogoh kocek lebih dalam untuk merekrut tenaga kontrak yang lebih mumpuni di bidangnya mengingat masih banyak tenaga kerja atau pegawai di setiap SKPD, khususnya di BPKAD Kabupaten Minahasa. 2020 (Pedomanrakyat.co.id)

Ketidaktepatan tujuan anggaran merupakan masalah yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa. Penyaluran dana desa di Kabupaten Minahasa hingga Mei 2022 tidak merata sehingga terkesan pilih kasih karena mayoritas penerimanya adalah keluarga yang memiliki ikatan dengan pejabat pemerintah daerah. Beberapa penerima bahkan memiliki dinding bambu dan atap terpal di rumahnya dan belum pernah menerima bantuan dari pemerintah setempat. 2022 (Pedomanrakyat.co.id)

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa belum berjalan secara maksimal karena belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemerintah daerah dengan tanggung jawab yang dilimpahkan yaitu pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan tesis yang berjudul Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja dan Ketepatan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah di BPKAD Kabupaten Minahasa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:8), penelitian kuantitatif adalah metodologi penelitian yang didasarkan pada filosofi positivis yang digunakan untuk melakukan penelitian pada populasi atau sampel tertentu. Ini menggunakan alat penelitian untuk pengumpulan data, analisis data kuantitatif atau statistik, dan tujuan utamanya adalah untuk menguji praduga. ditentukan sebelumnya. analisis yang digunakan oleh para peneliti untuk memastikan dampak setiap variabel menggunakan berbagai metodologi analisis regresi linier. Peneliti memilih metode kajian ini untuk memastikan dampak ketepatan sasaran anggaran (X2) dan penganggaran berbasis kinerja (X1) terhadap pengoperasian mesin pemerintah daerah (Y). Ketepatan target anggaran dan anggaran berbasis kinerja (X1) merupakan variabel bebas penelitian (X2).

Populasi penelitian yang berjumlah 50 orang adalah seluruh pegawai BPKAD Minahasa. 31 peserta dijadikan sampel penelitian dengan menggunakan metodologi Purposive sampling (judgmental sampling).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Analisis linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

		Koefisien				
		Koefisien tidak standar		Koefisien Standar	T	Sig.
Model	B	std. Kesalahan	Beta			
1	(Konstan)	44.646	6.541		6.825	0.000

Penganggaran berbasis kinerja	0,627	0,163	0,602	3.848	0,001
Ketepatan Target Anggaran	0,487	0,144	0,507	3.377	0,002
A. Variabel Dependen: Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah					

Sumber: Output SPSS 25, hasil olahan peneliti

Dari Tabel 1, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 33,687 + 0,627X_1 + 0,487X_2$$

Dari persamaan rumus tersebut, dapat diartikan:

- Nilai konstanta sebesar 44,646 artinya jika kedua variabel independen: penganggaran berbasis kinerja dan ketepatan sasaran anggaran dianggap konstan yaitu sama dengan nol ( $X_1$  dan  $X_2 = 0$ ), maka variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah peralatan, adalah 44.646.
- $\beta_1$  atau koefisien regresi pada variabel bebas pertama atau anggaran berbasis kinerja menghasilkan nilai positif sebesar 0,627. Artinya setiap ada penambahan 1 unit maka akan diikuti dengan penambahan kinerja aparatur sebesar 0,627 sedangkan asumsi variabel lainnya konstan.
- $\beta_2$  yang berarti bahwa koefisien regresi  $X_2$  pada ketepatan sasaran anggaran sebesar 0,487 dengan hasil positif yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan kejelasan sasaran anggaran dalam satu satuan akan diikuti dengan peningkatan kinerja aparatur Y dengan besaran sebesar 0,487, sedangkan variabel lainnya dianggap konstan.

### Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ )

T

**Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model ringkasan b				
Model	R	R persegi	R Square yang disesuaikan	std. Kesalahan Perkiraan
1	.598a	0,357	0,311	2.775
A. Predictors: (Constant), Ketepatan Target Anggaran, Anggaran Berbasis Kinerja				
B. Variabel Dependen: Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah				

Sumber: Output SPSS 25, hasil olahan peneliti

Berdasarkan Tabel 2, koefisien determinasi yang terdapat pada uraian R Square adalah 0,357, artinya persentase kontribusi variabel independen pertama dan kedua terhadap variabel dependen Y adalah sebesar 35,7%, sedangkan kelebihan sebesar 64,3% berasal dari mempengaruhi aspek-aspek lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Hasil Uji Parsial (t)

**Tabel 3. Hasil Uji Parsial (t)**

**Koefisiensa**

Model	Koefisien tidak standar		Koefisien Standar	T	Sig.
	B	std. Kesalahan	Beta		
1 (Konstan)	44.646	6.541		6.825	0.000
Penganggaran berbasis kinerja	0,627	0,163	0,602	3.848	0,001
Ketepatan Target Anggaran	0,487	0,144	0,507	3.377	0,002

A. Variabel Dependen: Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Sumber: Output SPSS 25, hasil olahan peneliti

Dari output SPSS versi 25 seperti terlihat pada tabel di atas, secara parsial dapat dijelaskan bahwa hipotesis pertama untuk variabel independen pertama (X1) pada variabel Y menunjukkan anggaran berbasis kinerja memiliki thitung sebesar 3,848 > ttabel sebesar 2,048 dan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05. Hasil ini menggambarkan bahwa H2 dikabulkan, karena anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Selain pengujian hipotesis kedua yaitu variabel bebas kedua (X2) terhadap variabel Y dijelaskan bahwa ketepatan sasaran anggaran memiliki thitung lebih dari ttabel (3,377 > 2,048) dan untuk sig. it (0,002 < 0,05), sehingga kesimpulannya hipotesis kedua dapat diterima dengan diketahui bahwa ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

### Uji F (Uji Simultan)

**Tabel 4. Hasil Uji F**

ANOVA					
Model	Jumlah Kuadrat	df	Kuadrat Rata-Rata	F	Sig.
1 Regresi	119.813	2	59.907	7.780	.002b
sisa	215.606	28	7.700		
Total	335.419	30			

A. Variabel Dependen: Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah  
 B. Predictors: (Constant), Ketepatan Target Anggaran, Anggaran Berbasis Kinerja

Sumber: Output SPSS 25, hasil olahan peneliti

Dari output SPSS versi 25 seperti pada tabel di atas dijelaskan bahwa hasil uji hipotesis ketiga secara simultan variabel X1 dan X2 pada variabel Y menunjukkan nilai fhitung 7,780 > ftabel 3,328 dan tingkat signifikan 0,002 < 0,05 . Hasil ini menggambarkan bahwa H3 dikabulkan, karena penganggaran berbasis kinerja dan ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

## Pembahasan Hasil Penelitian

### Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Menurut temuan, penganggaran berbasis kinerja sebagian dan secara signifikan meningkatkan efisiensi aparatur pemerintah daerah di BPKAD Minahasa. Demonstrasi ini didasarkan pada temuan uji parsial variabel X1 terhadap Y yang menghasilkan nilai thitung lebih besar dari ttabel ( $3,848 > 2,048$ ) dan taraf signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Ini menyiratkan bahwa sistem penganggaran berorientasi hasil yang dilaksanakan dengan tepat juga akan meningkatkan tanggung jawab atas efektivitas mesin pemerintah. Karena sistem anggaran untuk peningkatan kinerja berhasil diterapkan di BPKAD Minahasa, penganggaran berbasis kinerja lebih baik diterapkan di sana untuk mendorong kinerja yang lebih baik dari pegawai pemerintah daerah. Mengingat kinerja pemerintah daerah terlihat menunjukkan dirinya melalui beberapa tahapan, sistem anggaran berorientasi kinerja ini dianggap sebagai alat atau solusi. Semua pihak yang berkepentingan sangat perlu memahami tahapan-tahapan komponen penganggaran berbasis kinerja dalam setiap bentuknya. Pembuatan, persetujuan, pelaksanaan, pelaporan, dan peninjauan anggaran adalah beberapa komponen dari fase ini. Ketika proses yang dirancang untuk mengimplementasikan aspek-aspek tersebut telah benar-benar dilaksanakan, tujuan penganggaran berbasis kinerja akan berhasil. Mengingat hal ini, dapat dikatakan bahwa penjelasan yang disarankan masuk akal. Hal ini disebabkan, dari segi keterbatasan, penggunaan anggaran berbasis kinerja mempengaruhi efektivitas aparatur pemerintah daerah. Semua pihak yang berkepentingan sangat perlu memahami tahapan-tahapan komponen penganggaran berbasis kinerja dalam setiap bentuknya. Pembuatan, persetujuan, pelaksanaan, pelaporan, dan peninjauan anggaran adalah beberapa komponen dari fase ini. Ketika proses yang dirancang untuk mengimplementasikan aspek-aspek tersebut telah benar-benar dilaksanakan, tujuan penganggaran berbasis kinerja akan berhasil. Mengingat hal ini, dapat dikatakan bahwa penjelasan yang disarankan masuk akal. Hal ini disebabkan, dari segi keterbatasan, penggunaan anggaran berbasis kinerja mempengaruhi efektivitas aparatur pemerintah daerah. Semua pihak yang berkepentingan sangat perlu memahami tahapan-tahapan komponen penganggaran berbasis kinerja dalam setiap bentuknya. Pembuatan, persetujuan, pelaksanaan, pelaporan, dan peninjauan anggaran adalah beberapa komponen dari fase ini. Ketika proses yang dirancang untuk mengimplementasikan aspek-aspek tersebut telah benar-benar dilaksanakan, tujuan penganggaran berbasis kinerja akan berhasil. Mengingat hal ini, dapat dikatakan bahwa penjelasan yang disarankan masuk akal. Hal ini disebabkan, dari segi keterbatasan, penggunaan anggaran berbasis kinerja mempengaruhi efektivitas aparatur pemerintah daerah. tujuan penganggaran berbasis kinerja akan berhasil. Mengingat hal ini, dapat dikatakan bahwa penjelasan yang disarankan masuk akal. Hal ini disebabkan, dari segi keterbatasan, penggunaan anggaran berbasis kinerja mempengaruhi efektivitas aparatur pemerintah daerah. tujuan penganggaran berbasis kinerja akan berhasil. Mengingat hal ini, dapat dikatakan bahwa penjelasan yang disarankan masuk akal. Hal ini disebabkan, dari segi keterbatasan, penggunaan anggaran berbasis kinerja mempengaruhi efektivitas aparatur pemerintah daerah.

### Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Ketepatan sasaran anggaran terbukti memberikan dampak yang cukup besar dan menguntungkan bagi kinerja aparatur pemerintah daerah di BPKAD Minahasa berdasarkan temuan pengolahan data. Pembelian ini sesuai dengan temuan uji t, dimana thitung variabel ketepatan sasaran anggaran sebesar  $3,377 > ttabel$  sebesar  $2,048$  dan memiliki nilai signifikansi  $0,002 < 0,05$ . Analisis data tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa kinerja pemerintah daerah akan meningkat berbanding lurus dengan ketepatan tujuan anggaran. Sasaran anggaran yang jelas pada akhirnya akan memudahkan personel BPKAD Minahasa

untuk mengeksekusi anggaran dan mencapai tujuan anggaran yang dimaksud. Selain itu, tampaknya alasan kedua adalah tujuan anggaran ini akurat dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan pengetahuan tujuan yang lebih baik.

### **Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja dan Ketepatan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah**

Temuan dari pengujian bersamaan (uji F) menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja dan ketepatan tujuan anggaran digabungkan memiliki pengaruh yang jelas dan substansial terhadap pengoperasian perangkat pemerintah daerah. Hasil Fhitung dengan nilai positif  $7,780 > F_{tabel} 3,328$  dan taraf signifikansi  $0,002 < 0,05$  menjadi bukti. Hal ini berimplikasi bahwa setiap kenaikan anggaran berbasis kinerja dan peningkatan ketepatan sasaran anggaran akan meningkatkan efisiensi operasional pemerintah daerah. Efektivitas aparatur pemerintah daerah juga akan meningkat ketika kedua cara pandang ini dilakukan karena secara efektif dijalankan secara maksimal, begitu pula sebaliknya. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Priatna (2018), yang berkesimpulan bahwa kinerja pemerintah daerah akan meningkat jika penganggaran berbasis kinerja dan ketepatan sasaran anggaran meningkat. Menurut temuan studi, anggaran yang dibuat memenuhi persyaratan untuk dapat dialokasikan secara jelas dan tepat sesuai kebutuhan dalam parameter kewenangannya. Penelitian Kristian Evaranus (2020) berjudul Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran, dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah juga sejalan dengan penelitian ini.

### **KESIMPULAN**

Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh variabel Penganggaran Berbasis Kinerja dan Ketepatan Sasaran Anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Kesimpulan berikut dapat diambil dari studi yang dilaporkan dalam bab sebelumnya:

1. Penganggaran berbasis kinerja  
Kinerja aparatur pemerintah daerah di BPKAD Minahasa dipengaruhi secara positif oleh penganggaran berbasis kinerja; akibatnya, sistem penganggaran yang berorientasi pada hasil yang semakin diterapkan dengan sangat tepat juga akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah di BPKAD Minahasa.
2. Ketepatan Target Anggaran  
Kinerja aparatur pemerintah daerah BPKAD Minahasa dipengaruhi secara positif oleh ketepatan tujuan anggaran, oleh karena itu dapat diartikan bahwa kinerja pemerintah daerah di BPKAD Minahasa akan meningkat berbanding lurus dengan seberapa akurat tujuan anggaran tercapai.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggi Pratama Nst, SEMS (2018). Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Di Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal*, 1–25.
- Ana Muchilis Rezeqiah. (2017). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan).
- Febrina, O. & Verasxvera, A. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Dalam Jurnal Manajemen (Vol. 15, Edisi 2)*.

- Ida Ayu MadeDwiki Paramitha, G. (2016). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal*, 16.3.
- Kristiani Evaranus, W. (2020). Pengaruh Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran, dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. (Vol.9)
- Lantu, F. T., Pangkey, R., & Sumampouw, O. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 91-97.
- M. Fadhil Junery, S.Ei. , MENSA (2018). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis).
- Nur Desiana Wardani1, DS (2021). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp) Provinsi Lampung. *Jurnal*, 6(1), 1–56.
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Bupati Minahasa Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
- Rampen, A., Senduk, V. ., & Bacilius, A. (2021). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tomohon : Studi Kasus Di Bapelitbangda Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(2), 199-206.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, dan R&D. No.84 Bandung: ALPHABETA, CV.
- Utama, FA (2018). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri Tahun 2018.
- U'ah Ganda Fratiwi. (2018). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal*, Vol. 3 No.4
- Venni Avionita. (2013). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal*, 1–24.
- Weni Nirmala Sari. (2017). Jom Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017896 Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Good Governance (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). Di Jom Fekon (Vol. 4, Edisi 1). [Http://Www.Menpan.Go.Id](http://www.Menpan.Go.Id)
- Wongkar, D. L., Senduk, V. ., & Tanor, L. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 1-7.
- [www.pedomanrakyat.co.id](http://www.pedomanrakyat.co.id)
- Zebua, D. T. S., Manaroinsong, J. ., & Moroki, florence. (2022). Analisis Realisasi Anggaran Rutin Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 1-10.